

# PANDANGAN KAUM SALAFI RAUDLATUL AMIN DESA KETAPANG DAYA TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SAMPANG

**Arief Rahmanul Hakim**

Lembaga Penelitian dan Pelatihan Lentera Institute Surabaya  
*arief.rahmanul92@gmail.com*

## **Abstract**

This article has been written based on the research about political attitudes of the salafi members of *majelis taklim* Raudlatul Amin in Ketapang Daya, Sampang on democracy and elections in Indonesia. Using qualitative approach the study aims to answer two main questions, are: *first*, how are the perceptions of the Salafi group about elections in Indonesia? *Second*, how do the salafi members perceive the mechanism of electing the leaders? The study has resulted in two main conclusions are: *first*, to the salafi members of *majelis taklim* Raudlatul Amin Ketapang, democratic system, in which leaders are elected through elections where the winner is decided based on the majority vote, is incompatible with the Islamic teachings. *Second*, this group argues that the mechanism of electing leaders should conform with that of mechanism exemplified by *Salaf as-Salih*, namely the models of nomination or hereditary.

**Keywords:** The Salafi, Elections, Election of leaders

## **Abstrak**

Tulisan ini berdasarkan penelitian tentang sikap politik kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang terhadap demokrasi dan pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang berupa; *pertama*, bagaimana pandangan kaum salafi tersebut tentang pemilu di Indonesia? *Kedua*, bagaimana mekanisme memilih pemimpin menurut kaum salafi tersebut? Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, bagi kaum salafi *Majelis Taklim Raudlatul Amin* Ketapang Daya, sistem demokrasi dengan model pemilihan pemimpin melalui pemilu yang pemenangnya didasarkan atas suara mayoritas, adalah cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, mekanisme dalam memilih harus seperti yang dilakukan oleh para *salaf as-shalih*, yakni model penunjukan, atau turun menurun.

**Kata Kunci:** Salafi, pemilihan, pemilihan pemimpin

## Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji tentang pandangan kaum salafi terhadap pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik pemilihan legislatif (pileg) 2014 maupun pemilihan presiden (pilpres) 2014. Dipilihnya salafi dalam hal ini karena dari sisi ideologi, salafi mengusung ideologi puritan dengan slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadith dengan mencontoh amalan para sahabat dan *salafus shalih* (Al Madkholi, 2001:17). Dengan demikian, dakwah salafi diklaim sebagai gerakan dakwah yang mengajarkan dan mengamalkan syari'at secara murni. Dakwah kaum salafi berkembang dan bergerak di berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Kaum salafi menjaga agar tidak terkontaminasi oleh kelompok atau organisasi yang bertentangan dengan Islam, sehingga terwujud Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Selain itu menurut kaum salafi, gerakan *hizbiyyah* (kelompok atau partai yang berdakwah melalui jalur politik) adalah cara baru yang tidak ada dasar hukumnya. Kaum salafi menilai gerakan tersebut membuat tujuan utama berdakwah terabaikan karena terfokus pada kepentingan politik sendiri (fanatisme golongan). Dengan demikian, kaum salafi melawan seluruh bentuk fanatisme golongan seperti partai politik. Realitasnya, partai politik cenderung hanya memobilisasi massa untuk meraih kekuasaan semata (Baabduh, 2006:24).

Kaum muslimin terlarang masuk dalam parlemen karena dipastikan melakukan penyimpangan dari ajaran Islam. Bentuk penyimpangannya yakni melakukan mu'amalat riba pada lembaga-lembaga pemerintahan. Hakekatnya, anggota-anggota parlemen dipilih melalui proses pemilu. Dalam pemilihan umum keputusan akhir diserahkan pada suara mayoritas. Menurutnya, suara mayoritas bukan kehendak Tuhan dan hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah dan muslim dilarang menyerahkan kekuasaan pada kaum mayoritas yang belum tentu memperjuangkan Islam (Al Jazair, 1999:57). Dakwah kaum

salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dan tidak menyentuh wilayah politik (non-politis). Dalam menjalankan dakwahnya, kaum salafi juga tidak boleh membentuk organisasi massa, karena bertentangan dengan prinsip *non-hizbiyyah* (Rahmat, 2009: 119).

Berdasarkan temuan-temuan di atas, spekulasi pemikiran-pemikiran kaum salafi menjadi bahan diskusi yang menarik dan perlu diperjelas. Indonesia yang masih dalam proses demokrasi membutuhkan kerjasama dari warga Indonesia sendiri sebagai bentuk partisipasinya. Hakekatnya, setiap warga negara memiliki hak berpartisipasi aktif atau pun pasif untuk menentukan pilihan, termasuk kaum salafi. Meskipun demikian, setidaknya kaum salafi minimal memiliki pemikiran dan pandangan politik untuk diaplikasikan dalam sistem demokrasi Indonesia sesuai dengan pemahamannya. Sistem demokrasi merupakan salah satu ide Barat yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia dalam sistem pemerintahannya. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Realitasnya, demokrasi tidak lepas dari unsur yang dinamakan pemilihan umum (pemilu). Rakyat secara tidak langsung diminta berpartisipasi dalam demokrasi.

Pemilihan umum sebagai metode sistem demokrasi tujuannya memilih perwakilan rakyat sebagai pembuat hukum dan memilih pemimpin untuk menjalankan hukum yang dibuat perwakilan rakyat tersebut. Konsekuensinya masyarakat diminta terlibat dengan pijakan keputusan mayoritas. Siapa yang layak dipilih, kriterianya menjadi keputusan suara mayoritas. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara (2009: 207) menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang (bakal) mereka pimpin.

Pemilu merupakan pengejawantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi

karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara. Pemilihan umum dan pemilihan kepala pemerintahan keputusannya diserahkan pada suara mayoritas. Suara mayoritas dinilai kaum salafi bukan kehendak dari Tuhan karena suara mayoritas belum tentu menjamin tidak berbuat kesalahan dan kesesatan (Wahib, 2007:25).

Kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang berjumlah kurang lebih 30 orang yang terdiri dari 2 orang ustadz dan 28 orang jama'ah. Kelompok ini merupakan kumpulan orang-orang yang mengaku ingin memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan Hadith. Al-Qur'an dan Hadith sebagai metode pemahaman dan pengamalan yang mana telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.

Kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ini tidak berdiri di bawah naungan struktur apapun yang mengikat. Cara dakwahnya yakni dari keinginan pribadi kemudian bercerita pada teman, tetangga, saudara kemudian didirikan Majelis Taklim tersebut. Dari satu orang tersebar ke orang lain yang tertarik setelah mendengarkan dakwah salafi, kemudian tersebar ke desa lain. Penyebaran itu kemudian mendapat respon dari orang yang ingin belajar salafi, sehingga Ustadz salafi diminta menyampaikan *taklim*. Dengan demikian, tidak ada yayasan, organisasi bahkan pondok pesantren formal untuk mengaturnya, artinya kesadaran orang untuk menunaikan kebutuhan manusia dalam beragama.

Pilihan penelitian terhadap kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin adalah karena pemikiran politik kaum salafi ini menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan pandangan

kaum salafi Raudlatul Amin terhadap demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu). Kaum salafi Raudlatul Amin berpandangan bahwa demokrasi adalah produk yang dihasilkan dari Barat dan tidak sesuai dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari ajaran yang disampaikan oleh ustadz salafi yang selalu menekankan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadith dalam semua aspek kehidupan.

Pemikiran kaum salafi tentang pemilu merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena kaum salafi berpandangan bahwa pemilu itu buruk dan hanya sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan oleh para elit politik. Berdasarkan realitas di atas, peneliti ingin mengupas secara mendalam tentang pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin di desa Ketapang Daya terhadap pemilihan umum. Oleh karena itu kemudian peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kaum salafi Raudlatul Amin terkait pandangannya terhadap pemilihan umum tahun 2014, baik itu pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres). Terutama dalam pilpres yang akan ditentukan pemimpin Indonesia selanjutnya. Selain itu, terkait dengan itu, peneliti juga ingin meneliti terkait dengan mekanisme dalam memilih pemimpin menurut kaum salafi Raudlatul Amin. Hal ini menarik karena menurut kaum salafi, Islam memiliki mekanisme sendiri dalam memilih pemimpin.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok persoalan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya terhadap pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif (pileg) 2014 maupun pemilu presiden (pilpres) 2014 di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sesuai dengan obyek yang peneliti pilih sebagai deskripsi komunitas secara langsung (data sebenarnya) di lapangan (Sugiyono, 2007:307). Untuk penelitian lapangan, dalam memunculkan data-data lapangan menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi langsung dengan subyek penelitian (Arikunto, 1996:144). Hal ini dilakukan karena disini peneliti ingin meneliti secara langsung terhadap fakta sosial. Penelitian yang berjenis penelitian lapangan ini dengan memaparkan serta mengkaji sumber-sumber data yang terdiri dari literatur-literatur ataupun referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian, di samping itu juga lewat tanya-jawab dengan informan.

### **Makna Politik Bagi Kaum Salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin**

Sistem demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia membuat rakyat memiliki kuasa penuh atas pemerintahan. Salafi sebagai bagian dari rakyat Indonesia, secara tidak langsung harus menerima penerapan sistem demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara. Salafi mengambil peranan sebagai rakyat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salafi ikut serta merealisasikan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari segala macam kerugian dan keburukan. Salafi sebagai muslim meyakini syari'at Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadith yang merupakan syari'at, aturan, petunjuk tuntunan hukum yang sempurna untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia semua bentuk kebaikan dan menjauhkan dari berbagai bentuk keburukan lahir dan batin serta dunia dan akhirat.

Salafi mengambil peranan dalam demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspeknya. Caranya dengan menyampaikan pengajaran, pemahaman, dan nasehat kepada rakyat maupun penguasa, sehingga mereka menyadari kesempurnaan syari'at Allah di dalam diri manusia tentang apa yang seharusnya

dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Sehingga dalam kehidupan demokrasi Indonesia, kaum salafi memfokuskan diri pada dakwah tauhid dengan membuka hati.

Pemahaman dan keyakinan akan kebenaran serta kesempurnaan syari'at, maka rakyat dan penguasa akan mengenakan tuntunan *syar'i* dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salafi mengambil peranannya sebagai rakyat di tengah sistem demokrasi dengan menentukan arah dan kebijakan pemerintah seperti yang ditentukan syari'at. Mempelajari dan memahami syari'at bagi dirinya sendiri dan mengamalkannya kemudian mendakwahnya kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, tanpa memaksakan kehendak. Dengan demikian, rakyat memiliki batas dan tanggung jawab, tanpa harus memaksakan konfrontasi dan penentangan kepada penguasa atau berbagai sikap yang menimbulkan berbagai kekacauan dan kerusakan yang justru kontradiktif dengan tujuan kemaslahatan.

Kemudian konsekuensi dengan dipilihnya sistem demokrasi untuk diterapkan di Indonesia adalah dengan mengadakan pemilihan umum (pemilu) yang rutin diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu dalam pandangan kaum salafi Raudlatul Amin merupakan alat atau sarana saja, bukan sebagai tujuan dari demokrasi. Sebagaimana dalam pengangkatan kepala negara dalam Islam tidak bermasalah manakala dipilih melalui proses pemilihan. Akan tetapi, setelah terpilih seorang pemimpin, pengangkatan melalui *ba'iat* (sumpah setia oleh umat yang dipimpinnya) untuk menjalankan hukum Islam, berbeda dengan demokrasi yang menempatkan kepala negara sebagai mandataris atau pemegang amanah untuk menjalankan konstitusi hukum sekuler.

Sufriyadi, salah seorang jama'ah kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya memaknai politik sebagai strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dengan meng-

gunakan segala sumber daya yang ada dan dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (bijaksana). Selain itu politik harus bertujuan untuk mengelola kepentingan umum dalam lingkup negara dengan cara-cara yang dapat menjamin terealisasinya kemashlahatan umum dan menghindarkan segala macam kerugian dengan jalan tidak melanggar syari'at Islam. Kaum salafi mengatakan bahwa politik yang adil tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Secara terminologi, hal itu diberi namasiyasah, sedangkan *siyasah* yang adil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syari'at itu sendiri (Al Jazair, 1999:22).

Cara kaum salafi Raudlatul Amin berpolitik yakni dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta berperan aktif untuk tujuan bersama berdasarkan ketentuan syari'at. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Sufriyadi (jama'ah Salafi) dengan menyatakan,

“Menjaga hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya mencapai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara ikut serta secara aktif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan peranan yang dimiliki dalam koridor-koridor yang dibenarkan oleh Al Qur'an dan Hadith.” (Sufriyadi, *Wawancara*, 31 Juli 2014)

Namun menurut Sufriyadi perpolitikan di Indonesia sudah tidak sesuai dengan tujuan politik yang sesungguhnya, dengan berpendapat,

“Dunia perpolitikan Indonesia lebih diwarnai oleh cara berpikir yang pragmatis dan materialistis. Segala media, sarana, dan lembaga-lembaga politik dijadikan oleh para aktornya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan.” (Sufriyadi, *Wawancara*, 31 Juli 2014)

Perjuangan dalam bidang politik tampaknya memang bukan agenda utama kaum salafi Raudlatul Amin karena perhatian dan keprihatinan kaum salafi berkaitan dengan

masalah akidah. Menurut mereka, masalah akidah umat Islam dianggap banyak menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Tuntutan kaum salafi tentang agama adalah untuk mengembalikan masyarakat ke dalam Islam yang benar dan murni, seperti yang dipraktekkan Nabi dan para sahabat.

Kaum salafi Raudlatul Amin menempatkan tekanan dakwah yang kuat pada pendidikan. Bukan hanya proses pendidikan akademis tetapi proses menyeluruh artinya menumbuhkan pribadi muslim yang paham agama dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian dakwah kaum salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dan tidak menyentuh wilayah politik (*non-politis*). Dalam menjalankan dakwahnya, kaum salafi tidak boleh membentuk organisasi massa, karena bertentangan dengan prinsip *non-hizbiyyah*.

Oleh karena itu, kaum salafi Raudlatul Amin mengkritik para fundamentalis yang memanfaatkan media politik dalam berdakwah dengan cukup keras. Penekanan kritik kaum salafi berkaitan dengan tidak pentingnya media politik sebagai metode untuk berdakwah. Hal tersebut menurut mereka merupakan cara ambisius yang mengelincirkan kaum fundamentalis. Masalah politik merupakan masalah yang cukup penting, tetapi harus dikaji lebih mendalam dasar-dasar *syar'i*-nya karena tanpa dasar itu upaya yang dilakukan akan sia-sia maka harus dipelajari dulu meskipun secara tekstual.

Jadi politik secara tidak langsung menurut kaum salafi Raudlatul Amin hukumnya wajib karena problema kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bernegara tidak akan berjalan tanpa adanya politik. Politik dimaknai sebagai cara atau strategi untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadith. Namun bagi kaum salafi politik bukanlah agenda utama mereka karena fokus perhatian kaum salafi pada pembentukan masyarakat secara akidah dan tauhid Islam benar sesuai tuntunan Al Qur'an dan Hadith.

Kaum salafi Raudlatul Amin tampaknya lebih memfokuskan diri pada pembentukan masyarakat secara tauhid Islam benar sehingga kemudian segala aspek kehidupan akan dengan sendiri mengikutinya. Terkait dengan hal tersebut Badrut Tamam (Ustadz Salafi) berpendapat,

“Kalau tauhidnya sudah benar, syari’at Islam akan dengan sendirinya dilaksanakan karena masyarakat yang tauhidnya kuat akan cenderung mematuhi perintah agama.” (Badrut Tamam, *Wawancara*, 19 Juni 2014)

Untuk itu, kaum salafi mengajarkan ketaatan total kepada *manhaj* berdasar Nabi Muhammad dan *salafus shalih*. *Al Salaf* merupakan kata umum yang merujuk pada pelopor Islam yang shaleh dan semua orang yang mengikuti jalan *salafus shalih* dalam keyakinan, moral, dan tingkah laku.

### **Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amin Terhadap Demokrasi**

Bagi kaum salafi Raudlatul Amin, sistem demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia membuat rakyat memiliki kuasa penuh atas pemerintahan. Salafi sebagai bagian dari rakyat Indonesia, secara tidak langsung harus menerima penarapan sistem demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara. Salafi mengambil peranan sebagai rakyat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salafi ikut serta merealisasikan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari segala macam kerugian dan keburukan. Salafi sebagai muslim meyakini syari’at Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadith yang merupakan syari’at, aturan, petunjuk tuntunan hukum yang sempurna untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia semua bentuk kebaikan dan menjauhkan dari berbagai bentuk keburukan lahir dan batin serta dunia dan akhirat.

Salafi mengambil peranan dalam demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspeknya. Caranya dengan menyampaikan pengajaran, pemahaman, dan nasehat kepada rakyat maupun

penguasa, sehingga mereka menyadari kesempurnaan syari'at Allah di dalam diri manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan.

Menurut kaum salafi Raudlatul Amin, demokrasi seharusnya tidak diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini karena demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi pemimpin tanpa tahu latar belakang orang tersebut. Pemilihan pemimpin negara juga seharusnya bukan melalui pemilihan umum. Badrut Tamam selaku ustadz kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin mengatakan,

“Benar bahwa demokrasi tidak mengharamkan pemimpin non-muslim, asal dipilih oleh rakyat. Namun dengan begitu seorang pencuri, perampok, pembunuh, pezina dan orang kafir sekalipun, ‘layak’ dijadikan pemimpin. Demokrasi itu sendiri adalah ajaran impor dari negeri-negeri kafir yang di negeri mereka sendiri pemimpin muslim hampir mustahil terpilih. Dan membawa-bawa Islam dalam dunia demokrasi tidak produktif, tidak mencerdaskan dan hanya mengkotak-kotakan.” (Badrut Tamam, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Noorhaidi Hasan dalam tulisannya menyatakan bahwa penolakan kaum salafi terhadap demokrasi mengakibatkan kaum salafi menolak cara bernegara yang lahir dalam sistem demokrasi. Kaum salafi menolak pemilu sebagai cara untuk memilih pemimpin. Pemilu bertujuan mengetahui kehendak mayoritas, bukan kehendak Tuhan, sebagai dasar untuk memilih pemimpin dan ini merupakan amalan jahiliyah. Pemilu adalah cara musuh Islam untuk menguasai umat Islam karena menyerahkan kekuasaan yang rakyat miliki kepada musuh Islam (Hasan, 2008: 151).

Abdul Qodar Jaelani, selaku jama'ah salafi memberikan respon tentang demokrasi yang diadopsi dari pemikiran Barat dengan mengatakan,

“Terlepas dari dikotomi Islam dan Barat, demokrasi merupakan sistem yang lebih banyak mendatangkan kerusakan yang seharusnya tidak diterima dalam peradaban manapun. Atas nama hak sebagai warga negara membebaskan keikutsertaan setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan segala urusan negara. Keikutsertaan rakyat yang kebanyakan tidak paham permasalahan, ditunggangi oleh kepentingan kelompok-kelompok bermodal yang akhirnya menyeret rakyat dalam kehidupan feodalisme.” (Abdul Qodar Jaelani, *Wawancara*, 21 Juni 2014)

Sedangkan Robby Anggara (jama'ah salafi) memberikan pandangan yang cukup keras terhadap demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia dari Barat tersebut. Dia mengatakan,

“Demokrasi itu apa, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apakah ada yang seperti itu? Kenyataannya pemerintahan atau kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan. Selama ini rakyat hanya dibodohi dan menjadi korban permainan politik para elit yang memiliki kepentingan saja. Jadi konsep tentang demokrasi itu hanyalah konsep yang semu.” (Robby Anggara, *Wawancara*, 22 Juni 2014)

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, kaum salafi Raudlatul Amin secara konsisten menolak sistem demokrasi untuk diterapkan di Indonesia. Karena sistem demokrasi ini merupakan sistem yang diadopsi dari pemikiran Barat yang lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Kaum salafi menconthokkan dalam pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) kemarin yang terdapat banyak kecurangan seperti yang terjadi di desa Ketapang Barat pada saat pilpres atau pada saat pileg ada kecurangan di desa Bira Barat.

Meskipun menolak demokrasi, kaum salafi Raudlatul Amin tetap mengambil peranan dalam demokrasi untuk mewujudkan ke-maslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspeknya. Caranya dengan menyampaikan pengajaran, pemahaman, dan nasehat kepada rakyat maupun penguasa sesuai dengan cara-cara yang Islami.

## **Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amin tentang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014**

Pada beberapa waktu yang lalu Indonesia sudah mengadakan dua agenda pemilihan umum yakni pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres). Kedua pemilihan umum (pemilu) ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam kedua pemilu tersebut, tidak terkecuali kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya.

Bagi kaum salafi tersebut, dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sehingga pemimpin merupakan wakil suara mayoritas. Menurut mereka, cara seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. Muslim dilarang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada kaum mayoritas masyarakat karena tidak ada jaminan kaum mayoritas tidak berbuat kesalahan dan kesesatan. Mayoritas juga belum tentu berjuang untuk kejayaan Islam. Oleh karena itu, demokrasi bukan jalan yang tepat untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Bahkan sistem ini membuka peluang untuk menciptakan kesesatan dan kerusakan.

Moh. Ali Nardin, selaku jama'ah salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin mengaitkan pandangannya tentang sistem demokrasi yang dipakai saat ini di Indonesia dengan mengatakan,

“Di dalam sistem demokrasi tidak dibedakan antara orang yang berkompeten dan orang yang tidak berkompeten, sedangkan kebanyakan dari rakyat adalah orang-orang yang tidak berkompeten, sehingga mustahil terhasikan pemimpin yang memenuhi kriteria yang layak sebagai pemimpin.” (Mohammad Ali Nardin, *Wawancara*, 13 Juli 2014)

Kaum salafi memiliki pandangan sendiri terhadap pelaksanaan pileg dan pilpres di Indonesia. Abdul Qodar Jaelani

selaku jama'ah salafi ketika ditanya tentang pandangannya terhadap pileg mengatakan,

“Pileg merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap Islam dimana dalam pileg banyak orang yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan dan melakukan segala cara untuk mencapainya.” (Abdul Qodar Jaelani, *Wawancara*, 1 Agustus 2014)

Baihaki Husein (jama'ah Salafi), juga memiliki pandangan serupa dengan mengatakan,

“Pileg merupakan sistem pemilihan yang banyak menimbulkan kemudharatan dimana disana banyak terjadi kecurangan dan bentuk-bentuk penyelewengan yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadith.” (Baihaki Husein, *Wawancara*, 31 Juli 2014)

Sedangkan terkait dengan pilpres, Baihaki Husein menyatakan,

“Baik pileg maupun pilpres keduanya sama-sama menimbulkan banyak kemudharatan. Jadi keduanya bagi saya tidak terlalu penting sehingga saya lebih memilih golput.” (Baihaki Husein, *Wawancara*, 31 Juli 2014)

Abdul Qodar Jaelani (jama'ah Salafi), juga memiliki pandangan yang tidak berbeda jauh dari Baihaki Husein ketika ditanya tentang pandangannya terhadap pilpres dengan menyatakan,

“Pilpres merupakan mekanisme pemilihan pemimpin yang salah. Islam sudah memiliki mekanisme sendiri dalam memilih pemimpin sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat dan salafus shalih.” (Abdul Qodar Jaelani, *Wawancara*, 1 Agustus 2014)

Menurut kaum salafi pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres) menimbulkan beberapa kerusakan. Apabila diringkas beberapa kerusakan demokrasi dan pemilu itu seperti pendapat Muhammad Umar As Sewed (Muhammad Umar As-Sewed. [www.salafy.or.id/id\\_artikel/](http://www.salafy.or.id/id_artikel/)), mantan ketua Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), kerusakan-kerusakan pemilu sebagai berikut.

*Pertama*, pemilu adalah sebuah upaya menyekutukan Allah (syirik) karena menetapkan aturan berdasarkan suara terbanyak (rakyat), padahal yang berhak untuk itu hanya Allah. *Kedua*, apa yang disepakati suara terbanyak itulah yang dianggap sah, meskipun bertentangan dengan agama atau aturan Allah dan Rasul-Nya. *Ketiga*, pemilu adalah tuduhan tidak langsung kepada Islam bahwa Islam tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil sehingga membutuhkan sistem lain. *Keempat*, partai-partai Islam tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang ada, meskipun aturan itu bertentangan dengan Islam. *Kelima*, dalam pemilu terdapat prinsip *jahannamiyah*, yaitu menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan-tujuan politis, dan sangat sedikit yang selamat dari itu. *Keenam*, pemilu berpotensi besar menamakan fanatisme jahiliah terhadap partai-partai yang ada.

Kerusakan-kerusakan pemilu di atas, menurut kaum salafi Raudlatul Amin secara mutlak dapat direpresentasikan bahwa kaum salafi dalam pemilu, memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput). Hal ini terbukti dengan jawaban kaum salafi atas pertanyaan tentang bentuk partisipasinya dalam pemilu di Indonesia. Badrut Tamam selaku ustadz kaum salafi mengakui dengan mengatakan,

“Kami (kaum salafi) tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu karena dalam proses pemilu di Indonesia terjadi banyak kecurangan-kecurangan. Kami juga melihat pemilu ini banyak menimbulkan kemudharatan untuk rakyat, misalnya seperti pemilu legislatif, kita tidak mengetahui asal-usul calonnya dan calon yang telah terpilih juga sering menyalahgunakan wewenangnya. Karena hal itu kami memilih untuk golput. Untuk pemilihan presiden (9 Juli) kami tetap memilih untuk golput, karena kami melihat dari dua calon yang bertarung kami merasa bahwa mereka tidak mengusung kepentingan Islam.” (Badrut Tamam, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Sumardi (ustadz Salafi) yang mengatakan,

“Menurut saya, pilihan golput adalah pilihan yang paling sesuai dengan aqidah (keyakinan) berdasarkan pada dalil-dalil syar’i yang menyatakan bahwa ketika seorang muslim telah mengikuti ajaran, sistem agama lain termasuk di dalamnya demokrasi dan pemilunya maka ia telah dianggap telah menyalahi ajaran agamanya. Islam yang dianggap tidak mengenal sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum. Motivasi inilah yang kemudian mendasari kaum salafi memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemilu.” (Sumardi, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Kemudian Abdul Heki (jama’ah salafi) menambahkan bahwa pilihan golput yang diambil merupakan suatu pilihan yang rasional dalam pemilu di Indonesia ini. Dia mengatakan,

“Tindakan golput yang kami lakukan mempunyai aspek pertimbangan rasional atau dapat dikatakan sebagai tindakan rasional. Golput dilakukan untuk menyelamatkan aqidah (keyakinan) karena pemilu tidak sesuai dengan ajaran Islam.” (Abdul Heki, *Wawancara*, 13 Juli 2014)

Meski tidak secara terang-terangan menyuarakan golput karena demi menjaga adab untuk tidak memberontak keputusan pemerintah. Salafi tetap pada pendiriannya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Hal ini didasari atas sikapnya yang jelas-jelas menentang demokrasi beserta sarana-sarannya yang ada termasuk pemilihan umum yang digelar untuk memilih pemimpin. Alasan lain kaum salafi Raudlatul Amin memilih untuk golput adalah karena hal ini sudah merupakan konsekuensi dari apa yang diyakini selama ini.

Kaum salafi Raudlatul Amin meyakini bahwa segala sesuatu yang berasal dari Barat banyak menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh untuk diikuti. Islam sudah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada Al Qur’an dan Hadith. Keyakinan untuk golput ini juga diperkuat dengan kekecewaan kaum salafi Raudlatul Amin terhadap pemerintah dan realita banyaknya praktek manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam pemilu, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres).

Kaum salafi Raudlatul Amin memandang permasalahan aqidah (keyakinan) menjadi dasar utama untuk menolak keterlibatan di dalam pemilu. Dengan menganggap pemilu yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menyimpang dari keyakinan (aqidah). Sehingga kemudian memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput), baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres). Hal ini dibuktikan dengan tidak datangnya kaum salafi ke TPS pada saat pemilihan berlangsung.

Tindakan golput yang dilakukan oleh kaum salafi ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Selain itu tindakan golput yang dilakukan karena adanya kekecewaan politik karena parpol Islam yang terlibat di dalam proses demokrasi tidak sesuai harapan untuk menyuarakan syariat Islam. Sebagai buktinya bahwa meskipun memiliki hak pilih dalam pileg maupun pilpres. Pada saat pemungutan suara, kaum salafi memilih untuk tidak datang ke TPS dan lebih memilih untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sawah.

Jadi dalam hal ini, kaum salafi memang menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres) sebagai konsekuensi dari apa yang diyakini. Hal ini berdasarkan fakta bahwa kaum salafi pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden, meskipun terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini karena menurut kaum salafi Raudlatul Amin, sistem pemilihan umum (pemilu) yang sekarang dilakukan oleh negara Indonesia tidak sama dengan sistem pemilihan pada masa *salaf as-shalih*. Menurut kaum salafi, sistem pemilihan yang dilakukan pada masa tersebut adalah dengan membentuk lembaga yang terdiri dari para cendekiawan/ulama yang menguasai bidang politik dan agama dan bekerja atas

bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Lembaga ini kemudian disebut *ahl al-halli wal 'aqdi* yang bertugas memilih pemimpin untuk dipatuhi dan ditaati oleh rakyat.

### **Sikap Kaum Salafi Raudlatul Amin terhadap Pemerintah**

Meskipun kaum salafi Raudlatul Amin menolak mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu, namun dalam perjalanannya kaum salafi menerima pemimpin yang dihasilkan dari sistem pemilu. Kaum salafi menekankan ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip yang harus dipegang oleh umat ketika menginginkan kehidupan yang baik. Ketaatan tersebut merupakan ketaatan yang bersyarat. Apabila perintah pemimpin bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk ditaati. Namun, jika perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib taat kepadanya. Baihaki Husein (jama'ah Salafi) menandakan,

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Baihaki Husein (jama'ah salafi), yang mengatakan, “Sesungguhnya merupakan bagian dari ketaatan kepada pemimpin apa yang Allah perintahkan, yaitu seorang muslim menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah bila tidak bertentangan dengan syari'at. Selama ia menjalankan peraturan itu berarti ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan mendapat pahala atas perbuatan itu. Dan barang siapa menentanginya berarti ia membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia berdosa karenanya.” (Baihaki Husein, *Wawancara*, 13 Juli 2014)

Kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin merupakan perkara yang telah disepakati secara *ijma'* oleh *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dibangun dengan dalil-dalil syari'at yang jelas dan mutawatir. *Salafus shalih* juga memerintahkan untuk memuliakan dan mendukung penguasa serta melarang untuk mencaci maki dan merendhaknya. Hal ini disinggung oleh Syaikh Al Atsari (Al Atsari, 2006:68) bahwa menjaga kemaslahatan umum adalah wajib. Sedangkan, kemaslahatan umum tidak dapat terwujud kecuali

dengan adanya kewibawaan penguasa dihadapan rakyat. Ketika rakyat berselisih (tidak taat) terhadap mereka atau mereka menghinakan penguasa maka akan hilanglah kemaslahatan tersebut.

Selain itu, ketika membicarakan tentang masalah hak-hak pemerintah Syaikh Al Atsari (Al Atsari, 2006:70) juga menegaskan akan ketinggian hak mereka dan apa yang diwajibkan untuk mereka yaitu menghormati dan memuliakannya. Hendaklah mereka diperlakukan dengan apa yang wajib untuk mereka yaitu penghormatan, pemuliaan dan apa yang Allah berikan dari pengagungan.

Menurut ulama di atas, syari'at telah memberikan kepada penguasa kedudukan yang tinggi dan mewajibkan rakyat untuk menghormati, memuliakan, dan menaati dari perkara yang menunjukkan kebesaran seorang penguasa. Barang siapa yang memuliakan penguasa dengan menjaga apa yang telah ditetapkan syari'at dari hak dan kewajibannya, seperti meninggikan, menghormati, mendukung dengan tidak lepas dari *amar ma'ruf*, maka balasannya yaitu Allah memuliakannya di dunia ini, meninggikan derajatnya, dan menggerakkan hati para hamba untuk memuliakan para pemimpinnya.

Pendapat ulama salafi tersebut digunakan sebagai rujukan kaum salafi Raudlatul Amin untuk menaati pemimpinnya, meskipun pemimpin tersebut dipilih dengan sistem yang tidak sesuai dengan Islam. Sufriyadi (jama'ah Salafi) mengatakan,

“Menaati apa-apa yang diwajibkan oleh pemimpin atas rakyatnya, termasuk kaum Salafi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at.” (Sufriyadi, *Wawancara*, 14 Juli 2014)

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Robby Anggara dengan berkata,

“Menaati pemerintah dalam perkara yang *ma'ruf* dan menasehati mereka dalam perkara yang *munkar* dengan tetap menjaga etika berlaku, kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan pemerintah.” (Robby Anggara, *Wawancara*, 14 Juli 2014)

Menurut kaum salafi Raudlatul Amin memperbaiki pemimpin bukan dengan melakukan kritik secara terbuka tetapi dilakukan dengan tanpa diketahui orang lain. Karena seorang pemimpin memiliki kewibawaan dan kehormatan yang harus dijaga. Islam tidak mengajarkan kebebasan mengkritik pemimpin sehingga hal itu menciptakan kekacauan dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi sekarang. Kaum salafi sebagai bagian dari rakyat Indonesia harus mematuhi segala kebijakan pemimpin negara Indonesia, khususnya kebijakan yang baik, tidak menyalahi *amar ma'ruf nahi munkar*, dan membawa kemaslahatan.

Dalam hal ini, kaum salafi Raudlatul Amin menekankan pentingnya taat kepada pemerintah (*ulil amri*) karena memang Al Qur'an memerintahkannya demikian. Menurut mereka cara taat kepada pemerintah adalah dengan menaati dalam perkara yang *ma'ruf* dan menasehati mereka dalam perkara yang *munkar* dengan tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintah.

### **Kriteria Pemimpin Menurut Kaum Salafi Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya**

Al Mawardi (2006:6) menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian sosial dalam suatu negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik secara rasional maupun syara'. Secara rasional, tidak mungkin ada suatu negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara atau daerah. Sebab jika demikian, maka masyarakat akan hidup dalam hukum rimba karena tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kezhaliman dan tidak ada pihak yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.

Secara *syara'*, kewajiban mengangkat pemimpin diketahui dari kesepakatan sahabat dan *tabi'in* karena para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka bergegas membaiah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi *khalifah* begitu juga pada masa-masa *tabi'in* mereka semua tidak pernah

membiarkan kepemimpinan kosong. Menurut *syara'*, *imam* (kepala negara) adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah duniawi dengan aturan-aturan agama, menempatkan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya dan menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Imam Al Mawardi (2006:7) menyatakan bahwa mengangkat pimpinan adalah *fardu kifayah*, jika dalam suatu negara belum ada presiden maka dibentuklah dulu dewan pemilih yang terdiri dari para cendekiawan muslim (*ahl al-halli wal 'aqdi*) lalu ditentukan kandidat presiden.

Dalam menentukan kriteria seorang pemimpin kaum salafi Raudlatul Amin menggunakan konsep kriteria pemimpin seperti yang digunakan oleh Imam Al Mawardi. Kriteria seorang pemimpin menurut kaum salafi Raudlatul Amin ada enam macam. Seperti yang disampaikan oleh Sumardi (ustadz salafi),

“*Pertama*, adil dan bijaksana. *Kedua*, berilmu pengetahuan sehingga bisa membuat keputusan yang tepat terhadap berbagai masalah yang timbul. *Ketiga*, sehat inderanya baik penglihatan, pendengaran, maupun lisannya. *Keempat*, memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi rakyatnya. *Kelima*, mempunyai kecerdasan yang membuat dirinya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik. *Keenam*, anggota tubuhnya normal dan tidak cacat.” (Sumardi, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Sumardi menambahkan selain keenam kategori di atas seorang pemimpin Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam, haruslah orang Islam itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadith bahwa seorang pemimpin harus beragama Islam. Dia menyatakan,

“Dari sisi ajaran Islam, hukum memilih pemimpin non-muslim adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith serta kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.” (Sumardi, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Beberapa kriteria tersebut ditegaskan juga oleh Ustadz Badrut Tamam, dengan mengatakan,

“Seorang pemimpin umat itu harus memiliki enam kriteria yakni; adil, berilmu pengetahuan, sehat inderanya, anggota tubuhnya normal atau tidak cacat, mempunyai kecerdasan dalam mengelola pemerintahan, dan memiliki keberanian serta ketegasan.” (Badrut Tamam, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Jadi menurut kaum salafi Raudlatul Amin seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria. Hal ini sebagai bentuk dari kualifikasi dari seorang calon pemimpin. Tujuannya adalah untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin dalam memimpin sebuah negara, terutama negara Indonesia. Sehingga untuk menjadi seorang pemimpin memang benar-benar orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Pemimpin juga harus beragama Islam karena dengan beragama Islam seorang pemimpin akan mendasarkan setiap langkahnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadith.

### **Mekanisme/Prosedur Pemilihan Pemimpin Menurut Kaum Salafi Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya**

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah keharusan, sehingga kekosongan pemimpin dalam sebuah negara, meski sesaat, memiliki dampak yang begitu besar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengatur persoalan kehidupan manusia merupakan kewajiban agama tertinggi, bahkan agama dan dunia tidak akan menjadi baik tanpa hal ini (Taimiyah, 2005:10). Dengan demikian manusia tidak bisa mengurus kepentingannya dengan baik bila tidak bersatu di bawah seorang pemimpin, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* tidak akan terlaksana tanpa adanya kepemimpinan. Mengangkat atau memilih pemimpin pemerintah merupakan kewajiban agama dan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dimaksudkan menaati Allah dan Rasul dalam memilih pemimpin. Kepemimpinan menjadi rusak apabila mayoritas manusia mengejar kedudukan atau harta benda dengan jabatan kepemimpinannya.

Kaum salafi sendiri dalam mengangkat atau memilih pemimpin memiliki pandangan tersendiri. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan umat Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadith. Menurut kaum salafi, dengan mengacu kepada pendapat Ibn Taymiyah (2005:10), berdasarkan sejarah Islam, pemimpin dipilih melalui tiga mekanisme sebagai berikut.

*Pertama*, penunjukan. Mekanisme penunjukan dilakukan oleh pemimpin terdahulu dengan menunjuk seseorang yang dianggap layak untuk menggantikannya. *Kedua*, pemilihan. Mekanisme pemilihan dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kriteria tertentu, yang kemudian mereka memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin. *Ketiga*, turun-temurun. Mekanisme turun-temurun dilakukan oleh seorang pemimpin yang memberikan kekuasaannya kepada anak atau keturunannya, untuk menggantikannya.

Menurut kaum salafi Raudlatul Amin, mekanisme pemilihan pemimpin yang cocok dan tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah mekanisme pemilihan. Namun mekanisme pemilihan ini tidak sama dengan mekanisme pemilu yang menyerahkan pemilihan pemimpin kepada orang banyak (suara mayoritas). Mekanisme pemilihan ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang beranggotakan para cendekiawan muslim atau ulama pakar ilmu syar'i yang dipilih sebagai perwakilan umat (rakyat) yang bertugas memilih kepala pemerintah melalui proses bai'at (pengambilan sumpah setia) dan bekerja atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya yang disebut sebagai dewan pemilih (*ahl al-halli wal 'aqdi*). Untuk konteks Indonesia, menurut kaum salafi Raudlatul Amin yang dimaksud *ahl al-halli wal 'aqdi* disini adalah misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut mereka, MUI cocok untuk menjadi perwakilan umat Islam dalam menentukan pemimpin Indonesia karena MUI terdiri dari para cendekiawan muslim dan para ulama.

Meskipun sudah jelas bahwa MUI cocok untuk dianggap sebagai *ahl al-halli wal 'aqdi*, namun dalam menentukan anggota *ahl al-halli wal 'aqdi* harus melalui beberapa syarat tertentu. Anggota ahl al-halli wal 'aqdi ditetapkan dengan syarat-syarat, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, beragama Islam. *Kedua*, berakal karena seorang yang tidak sehat jiwanya, tidak bisa menduduki posisi *ahl al-halli wal 'aqdi* dan kepemimpinan umat. *Ketiga*, seorang laki-laki. *Keempat*, merdeka. *Kelima*, bertaqwa karena syarat seorang yang boleh menjadi pemimpin umat adalah orang yang bertaqwa yaitu seorang yang dikenal di kalangan *ahl al-halli wal 'aqdi* (cendekiawan) dengan baiknya, ketaatannya menjalakan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya, dikenal kredibilitasnya dan ketundukan kaum muslim kepadanya. *Keenam*, berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dipilih sebagai kepemimpinan umat adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan ilmu yang memadai, termasuk spesialisasi dalam perkara pemerintahan. *Ketujuh*, tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai manapun. Artinya seorang anggota *ahl al-halli wal 'aqdi* seharusnya mampu bersikap independen dan netral. *Kedelapan*, baligh atau dengan kata lain adalah orang yang mempunyai usia memasuki dewasa dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk (Al Imam, 2009:193).

Baihaki Husein, selaku jama'ah salafi lainnya, ketika mintai tanggapan mengenai pandangan kaum salafi terhadap mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia, mengatakan,

“Dalam memilih pemimpin hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas untuk memilih calon pemimpin dan bukannya memilih pemimpin dilakukan oleh semua rakyat dimana sekian banyak rakyat Indonesia tidak semuanya mempunyai kapabilitas untuk memilih pemimpin secara tepat dikarenakan latar belakang ilmu dan pendidikan yang berbeda.” (Baihaki Husein, *Wawancara*, 13 Juli 2014)

Sufriyadi juga memiliki pendapat yang serupa dengan Baihaki Husein, dengan mengatakan,

“Pemilihan seorang pemimpin seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan pemilihan, sehingga mereka mampu melihat kualitas dari para calon pemimpin. Dan bukannya pemilihan diserahkan kepada rakyat yang keadaannya tidak memiliki kapabilitas untuk memilih pemimpin. Rakyat memiliki hak untuk menjadi pengawas pemimpin namun tidak memiliki hak untuk memilih.” (Sufriyadi, *Wawancara*, 14 Juli 2014)

Hal yang sama disampaikan oleh Ustadz Badrut Tamam dengan mengatakan,

“Seharusnya pemimpin dipilih oleh orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan kepemimpinan. Dengan begitu, maka akan terpilih pemimpin yang terbaik. Bukan melalui suara terbanyak, karena rakyat pasti memilih berdasarkan kecondongan perasaan, fanatisme golongan atau informasi sekilas semasa kampanye yang sesungguhnya jauh dari cukup untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib suatu bangsa.” (Badrut Tamam, *Wawancara*, 12 Juli 2014)

Berdasarkan realita di atas, kaum salafi Raudlatul Amin berpandangan terpaksa hidup dalam iklim demokrasi. Dalam situasi tersebut, kaum salafi diwajibkan untuk tetap menaati pemimpin dan diminta bersabar dengan segala kekurangan pemimpin. Kemiskinan, kesenjangan keadilan, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dipertontonkan setiap hari pada rakyat, sehingga kepentingan kesejahteraan bagi rakyat kurang tersentuh.

Dengan pemaparan di atas, jelaslah bahwa kaum salafi Raudlatul Amin menolak mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan kekurangan-kekurangannya seperti yang disebutkan di atas. Menurut kaum salafi, pemilihan pemimpin seharusnya dilakukan oleh lembaga yang terdiri dari para cendekiawan muslim sebagai perwakilan umat (rakyat) yang bertugas memilih pemimpin atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya melalui al-Qur'an dan Hadith. Dengan begitu, maka

akan terpilih seorang pemimpin yang memiliki kualifikasi seperti yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi dan diamini oleh kaum salafi yaitu adil, cerdas, sehat secara jasmani dan rohani, berani dan tegas, taat kepada agama, dan menguasai pengelolaan pemerintahan serta yang terpenting beragama Islam.

### **Tipologi Gerakan Kaum Salafi Raudlatul Amin**

Berdasarkan teori gerakan keagamaan khususnya Islam yang disampaikan oleh William E Shepard (1988:416) dalam tulisannya *“Islam and Ideology: Toward A Typology”*, kaum salafi Raudlatul Amin dapat diklasifikasikan ke dalam tipe gerakan neo-tradisionalisme karena mengajak kembali kepada kemurnian ajaran, yakni ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadith. Kaum salafi begitu selektif terhadap kultur yang berkembang di masyarakat guna mewujudkan tatanan yang mereka diinginkan. Meski tergolong kelompok fundamentalis, karena mengajak kembali kepada ajaran agama yang fundamental, kaum salafi berbeda dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain.

Sedangkan menurut Bernard Haykel (2003:24-37), kaum salafi memiliki beberapa karakter yang unik dan berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang lain, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, kebanyakan salafi bukanlah aktor politik. *Kedua*, terjadinya reformasi sosial dan agama menjadi perhatian utama. *Ketiga*, kaum salafi bisa dikenal dari cara berpakaian, perilaku agama, cara shalat dan cara berbicaranya. Hal itu sebagai wujud dari munculnya kesadaran melaksanakan perintah agama. *Keempat*, menekankan untuk merujuk kepada Al Qur’an dan Hadith. *Kelima*, terbatasnya hierarki dalam memahami ajaran Islam. Artinya kaum salafi dalam mencari dasar-dasar agama untuk memperteguh keyakinan mereka, tanpa melewati hierarki yang begitu rumit. *Keenam*, tidak dibatasi oleh wilayah dan tidak pula fundamentalis. *Ketujuh*, senantiasa mendasarkan segala perilaku dan

pandangan dengan merujuk pada teks yang bersumber dari wahyu, Al Qur'an dan al-Hadith. Contoh empiris, mereka begitu taat terhadap pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik secara terbuka. Hal ini tentu berbeda dengan gerakan fundamentalis lain yang melakukan kritik secara terbuka, dan bahkan mengkafirkannya ketika pemerintah tidak menjalankan hukum Allah.

Hal di atas sesuai dengan tujuan dakwah kaum salafi Raudlatul Amin yang ingin mempertahankan Islam secara murni dan sesuai dengan Islam dalam Al Qur'an dan Hadith serta praktek *salafus shalih*. Kaum salafi Raudlatul Amin bukan gerakan organisasi massa yang berorientasi pada politik, karena lebih mengutamakan pelebagaan Islam dalam masyarakat secara murni. Kaum salafi Raudlatul Amin mendukung pemerintahan Indonesia, selama tidak menyalahi syari'at yang tertulis dalam Al Qur'an dan Hadith.

Kaum salafi Raudlatul Amin menginginkan perubahan, dengan dakwah Islam, dari akar masyarakat yang paling bawah dan dimulai dari level individual dan transformasi personal. Kaum salafi Raudlatul Amin hanya berusaha untuk melakukan purifikasi (pemurnian) terhadap Islam. Kaum salafi menginginkan penerapan Islam dalam kehidupan masyarakat.

### **Penutup**

Mengacu kepada penelitian di atas, dalam hemat peneliti, hendaknya kaum salafi perlu untuk melakukan komunikasi intensif dengan kekuatan pro-demokrasi untuk menjalin sinergi dalam memperjuangkan tujuan gerakannya. Selain itu, kelompok ini harus menghargai setiap perbedaan pendapat utamanya dalam menyikapi permasalahan keterlibatan gerakan Islam dalam proses demokrasi.

### **Daftar Rujukan**

Al Atsari, Syaikh Abu Abdirrahman Fauzi. 2006. *Meredam Amarah terhadap Pemerintahan: Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. ter. Abu Ibrahim Muhammad Umar As Sewed. Pekalongan: Pustaka Sumayyah.

- Al Imam, Muhammad bin Abdillah. 2009. *Menggugat Demokrasi dan Pemilu*. Banyumas: Pustaka Salafiyah.
- Al Jazair, Syaikh Abdul Malik. 1999. *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Al Madkholi, Syaikh Muhammad bin Rabi' bin Hadi dan Abu Hasan Mushthofa bin Isma'il As Sulaimani. 2001. *Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahul Bid'ah Menuju Pemahaman Salaf*. ter. Abu Usamah Ibnu Rowiyah An Nawawy. Tegal: Maktabah Salafy Press.
- Al Mawardi, Imam. 2006. *Al Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. ter. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Gatara, Sahid. 2008. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasan, Noorhaidi. 2008. *Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Haykel, Bernard. 2003. *Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad Shawkani*. Cambridge: Cambridge University.
- Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, M. Imdadun. 2009. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Shepard, William E. 1988 *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, ed Syafiq Mughni. Canada: Coundrum Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taimiyah, Ibnu. 2005. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. ter. Rafi Munawir. Surabaya: Risalah Gusti.

### **Website, Jurnal, dan Wawancara**

Muhammad Umar As-Sewed. [www.salafy.or.id/id\\_artikel/](http://www.salafy.or.id/id_artikel/). (Jum'at, 20 Juni 2014 jam 13.00 WIB).

*Baabduh, Luqman*. 2006. *Musuh-musuh Dakwah Tauhid*. Asy Syari'ah.

*Bunyan Wahib, Ahmad*. 2007. "Gerakan Dakwah Salafi Paska Laskar Jihad", 1-205.

*Abdul Heki*. Wawancara, Sampang, 13 Juli 2014.

- Abdul Qodar Jaelani. Wawancara, Sampang, 1 Agustus 2014.*  
*Badrut Tamam. Wawancara, Sampang, 19 Juni 2014.*  
*Baihaki Husein. Wawancara, Sampang, 13 Juli 2014.*  
*Mohammad Ali Nardin. Wawancara, Sampang, 13 Juli 2014.*  
*Robby Anggara. Wawancara, Sampang, 22 Juni 2014.*  
*Sufriyadi. Wawancara, Sampang, 31 Juli 2014.*  
*Sumardi. Wawancara, Sampang, 12 Juli 2014.*